



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAMIANG LAYANG
TAHUN 2023**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR



Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur adalah merupakan wujud dari keinginan OPD meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta kredibilitas dalam pencapaian kinerja terhadap rencana kerja program guna adanya indikator dalam rangka pengevaluasian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, dimana di satu sisi adanya keberhasilan yang senantiasa terus ditingkatkan, sedangkan disisi lain adanya faktor kekurangan yang dapat dievaluasi untuk direkomendasikan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang lebih baik, sehingga program Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam rangka mewujudkan program-program prioritas dapat lebih akuntabel, efisien, responsif terhadap usulan-usulan masyarakat, serta dipertajam dan aplikabel untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

Dalam rangka transparansi atas implementasi Visi dan Misi yang telah dicanangkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur membuat laporan sebagai pertanggungjawaban tertulis berupa LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). LKIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Metode Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap struktur organisasi yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dilihat dari fungsi kendali yang diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman nantinya berkontribusi nyata mewujudkan *good governance*. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini diharapkan menjadi alat bantu (*tool*) internal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan self assessment atas kinerjanya selama ini. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tersebut bermakna adanya tantangan untuk mewujudkan profesionalisme, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2022 ini. Semoga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Tamiang Layang, Pebruari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BARITO TIMUR**



YUMAIL J PALADUK, ST., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19690514 199803 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Tugas dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	11
2.3 Indikator Keberhasilan Kinerja	17
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja	18
2.5 Struktur Organisasi dan Tupoksi Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	29
3.3 Capaian Kinerja Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan	34
3.4 Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Penutup.....	46
DAFTAR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2023	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja DPUPR Tahun 2022	8
Tabel 2.2 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2022	12
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2022	17
Tabel 2.4 Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.....	19
Tabel 3.2 Sasaran, Capaian Kinerja Tahun 2022.....	29
Tabel 3.3 Capaian Kinerja untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022	34
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pembangunan konstruksi di Kabupaten Barito Timur.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur Negara, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

Pencapaian sasaran strategis tersebut masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan, Irigasi, Bangunan, penyehatan lingkungan, sanitasi dan Air Bersih;
2. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kurang lengkapnya data jumlah penduduk yang belum memiliki Prasarana dan sarana Air Bersih;
3. Belum ada kesesuaian Rencana Penanganan Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Rencana Tata Ruang Wilayah baik nasional/provinsi/kabupaten kota;
4. Belum tersedianya data penyediaan tanah untuk pembangunan Sarana Publik Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya atau untuk masa mendatang. Hasil evaluasi ini dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada **Kepala Daerah (BUPATI)** atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimasukkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan dan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik dari Tahun sebelumnya.

2. Dasar Hukum

Dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2006.

Terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 256 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur pada Pemerintahan Kabupaten Barito Timur bisa diuraikan sebagai berikut :

- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur adalah unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten Barito Timur di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Permukiman;
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Timur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum, penataan ruang, Perumahan dan Permukiman dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan dan menyusun kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pemberian ijin dan atau rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pembinaan dan melakukan pengendalian teknis di bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan;
- Pembinaan dan melakukan pengendalian teknis di bidang pengairan;
- Pembinaan dan melakukan pengendalian teknis di bidang bina marga;
- Pembinaan dan melakukan pengendalian teknis di bidang cipta karya;
- Pembinaan dan melakukan pengendalian teknis di bidang Tata Ruang;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Penyusunan program dan anggaran di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kabupaten dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata ruang;
- Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten termasuk lintas kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kecamatan;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala kabupaten dan lintas kecamatan;
- Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kecamatan;
- Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di wilayah kabupaten dan atau pada wilayah sungai lintas kecamatan;
- Pembentukan komisi irigasi kabupaten dan pengesahan pembentukan komisi irigasi kecamatan;
- Penetapan dan pemberian ijin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kecamatan;
- Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kecamatan dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kecamatan;
- Pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder lintas kecamatan;
- Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kecamatan;
- Pengaturan jalan dan jembatan kabupaten meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan pedoman operasional

penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;

- Penetapan fungsi jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar kecamatan, jalan lokal dan jalan lingkungan, penetapan status jalan dan jembatan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan kabupaten;
- Pembinaan jalan dan jembatan kabupaten, fasilitasi penyelesaian sengketa antar kecamatan dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
- Pembangunan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- Penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah kecamatan;
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
- Pembangunan, pengawasan dan pengendalian air bersih di wilayah kabupaten;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
- Pembinaan pengembangan kawasan strategi kabupaten;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian peralatan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional pemeliharaan peralatan;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi skala kabupaten;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : ¹ Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, ² Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, ³ Indikator Kinerja Utama, ⁴ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁵ Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA, IKU, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA DPUPRPERKIM TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan Ukuran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Program/Kegiatan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	1	%	76	67,61	%	73.109.845.941,00	145.642.245.209,00	i. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN -.Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ~.Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
								iii. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN -. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ~. Pembangunan Jalan
								v. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN -. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ~. Pemeliharaan Rutin Jalan
								vi. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN -. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ~. Pembangunan Jembatan
								vii. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN -. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ~. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan Ukuran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Program/Kegiatan	
	2	Persentase rumah tangga yang terakses air bersih	%	95,60	89,38	%	7.887.010.102,00	3.999.235.829,00	<p>i. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM -. <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i> ~. <i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i></p> <p>ii. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM -. <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i> ~. <i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</i></p>

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dasar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja. Dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, juga ditujukan :

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur dalam mendukung tercapainya kemajuan masyarakat menggunakan pendekatan melalui *Balanced Scorecard* (BSC) ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. Stakeholder perspective;

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah.

2. Costumer Perspective;

Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

3. Internal Process Perspective;

Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan

4. Learn and Growth Perpective

- Terwujudnya ASN lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur;
- Terwujudnya Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima;
- Terkelolanya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur secara efisien dan akuntabel.

Untuk Perjanjian Kinerja Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 bisa dilihat pada Lampiran I.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang dicapai selama tahun 2022, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur 2018 - 2023. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian Visi Misi.

Implementasi Rencana Strategis tahun 2018-2023 untuk tahun 2022 banyak mengalami perubahan sejak numenklatur SOPD berubah pada tahun 2019. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran dari dana APBD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur sebesar Rp 120.788.039.236,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25.374.765.954,00. Dengan total anggaran sebesar Rp 146.162.805.190,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).

Tabel 2.2
Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2. Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Analisis Perangkat Daerah dan Laporan Rekonsiliasi Barang/Keuangan Perangkat Daerah, 3. Terlaksananya Pembayaran penghasilan ASN, Tersedianya Anggaran Koodinasi Dalam Daerah dan pengelolaan keuangan yang akurat, 4. Tersedianya Anggaran Laporan Capaian Kinerja Keuangan, 5. Tersedianya Instalasi dan Penerangan Kantor, Terlaksananya administrasi dan ketatausahaan, 6. Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan 	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwululan/ Semesteran SKPD 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Fasilitasi Kunjungan Tamu 12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	<p>7. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan,</p> <p>8. Tersedianya Anggaran Koodinasi Dalam Daerah, Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik,</p> <p>9. Tersedianya anggaran kesejahteraan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor,</p> <p>10. Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor,</p> <p>11. Tersedianya Anggaran Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten</p>		<p>16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
--	---	--	--

2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Anggaran Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya Kabupaten 2. Tersedianya Anggaran Pengendalian Banjir Kabupaten 3. Tersedianya Anggaran Peningkatan Kebersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Kabuapten 4. Tersedianya Anggaran Pusat Pemeliharaan Irigasi Kabupaten 	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 2. Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 3. Normalisasi/Restorasi Sungai 4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
3	Tercapainya Pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4	Terbangunnya sarana Persampahan daerah	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2. Penyediaan Sarana Persampahan
5	Tercapainya Pengembangan kinerja pengelolaan Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
6	Mengurangi Genangan Air Pada Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

7	Mengurangi genangan Pada Kawasan Permukiman, terjaganya penerangan jalan perkotaan dan pedesaan	Program Pengembangan Permukiman	1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8	Terpenuhinya Perizinan dan target Pemerintah.	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
9	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan
10	1. Tercapainya Pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Terlaksananya Peningkatan jalan dan jembatan 3. Tercapainya Pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Terbangunnya jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Jalan 3. Pemeliharaan Rutin Jalan 4. Pembangunan Jembatan 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan
11	Tersedianya Anggaran Untuk Pembinaan dan Pengawasan Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

12	Terbentuknya aturan mengenai Tata Ruang dan kawasan serta sistem informasi tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 4. Sistem Informasi Penataan Ruang
13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
		Program Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

2.3 Indikator Keberhasilan Kinerja

Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPRPERKIM dalam mewujudkan : Kemantapan Jalan, Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan Keterpaduan pembangunan antar daerah antar sektor dan tingkat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. 2. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang wilayah yang berkualitas 3. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur 4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, pesisir dan Pantai	1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) 2. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman	1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Baru Mencapai 91,56 %
	1. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/dtk	1. Pemerintah sudah merumuskan kebijakan yang jelas tentang peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan
	1. Pembuatan Saluran Primer 2. Terbangunnya Infrastruktur Penunjang Irigasi Bangunan Bagi Sadap	1. Membangun dan meningkatkan jaringan primer dan sekunder serta bangunan teknis lainnya untuk pendukung ketahanan pangan a. Peta situasi b. Luas Daerah Irigasi Data dan Skema Jaringan
	1. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan berskala komunitas/kawasan/kota	1. Pemerintah sudah merumuskan kebijakan yang jelas tentang peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan
	1. Tersedianya Perda RDTRK Perkotaan Tamiang Layang dan Perencanaan RDTRK Perkotaan Ampah dan Rencana Raperda RDTRK	1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 2. Meningkatkan akses jalan menuju semua

Sasaran	Indikator	Target
	2. Rendahnya Pengawasan terhadap Tonase Jalan. 3. Minimnya Dana untuk pembangunan Jalan dan Prasarana Lainnya. 4. Rendahnya kualitas Pekerjaan dan SDM 5. Lokasi Terpencil dan dari jangkauan Infrastruktur Terbangun	kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah sehingga semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi 3. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. 4. Kebutuhan hasil pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi dengan kualitas layanan yang baik.

2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam informasi kinerja atau evaluasi kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulan atau evaluasi monitoring (e-monev) yang merupakan aplikasi monitoring realisasi kegiatan, keuangan, atau pengelolaan kinerja SOPD Kabupaten Barito Timur.

Tabel 2.4

Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

DPA TA 2022															
No	Program	Pagu	Bulan												Keterangan
		Murni	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.593.000,00													
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.517.400,00													
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.496.635.422,00													
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376.050.000,00													
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.418.000,00													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00													
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.455.415,00													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.937.000,00													
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00													
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.200.000,00													

DPA TA 2022														
No	Program	Pagu	Bulan											Keterangan
		Murni	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.891.400,00												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00												
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.700.000,00												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.634.400.000,00												
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.372.320,00												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00												
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)													
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	218.023.500,00												
	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.157.944.921,00												
	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.450.248.160,00												
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	519.724.000,00												
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	384.882.500,00												

DPA TA 2022															
No	Program	Pagu	Bulan												Keterangan
		Murni	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agusts	Sept	Okt	Nov	Des	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	132.891.400,00													
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.084.434.576,00													
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	802.575.526,00													
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional														
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	199.349.590,00													
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	276.143.657,00													
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.811.801.191,00													
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	276.143.657,00													
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	3.811.801.191,00													

DPA TA 2022														
No	Program	Pagu	Bulan											Keterangan
		Murni	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	
7	Program Pengembangan Permukiman													
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.133.203.371,00												
8	Program Penataan Bangunan Gedung													
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	125.537.000,00												
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya													
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota													
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	102.150.900,00												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	9.930.174.452,00												
10	Program Penyelenggaraan Jalan													
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota													
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	560.308.207,00												

DPA TA 2022														
No	Program	Pagu	Bulan											Keterangan
		Murni	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agusts	Sept	Okt	Nov	
	Pembangunan Jalan	66.218.266.280,00												
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.982.154.640,00												
	Pembangunan Jembatan	489.774.294,00												
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	859.342.520,00												
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi													
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi													
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	140.358.400,00												
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota													
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	493.953.800,00												
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	143.570.800,00												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	70.110.300,00												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
	Sistem Informasi Penataan Ruang	34.561.400,00												

DPA TA 2022															
No	Program	Pagu	Bulan												Keterangan
		Murni	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agusts	Sept	Okt	Nov	Des	
13	Program Pengembangan Perumahan														
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	43.423.200,00													
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	31.562.600,00													
14	Program Kawasan Permukiman														
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	169.547.300,00													
15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.248.200,00													
16	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil														
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.248.200,00													
	TOTAL	119.307.681.430,00													

Rencana Aksi menggambarkan secara umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut aksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

2.3 Struktur Organisasi dan Tupoksi Pekerjaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

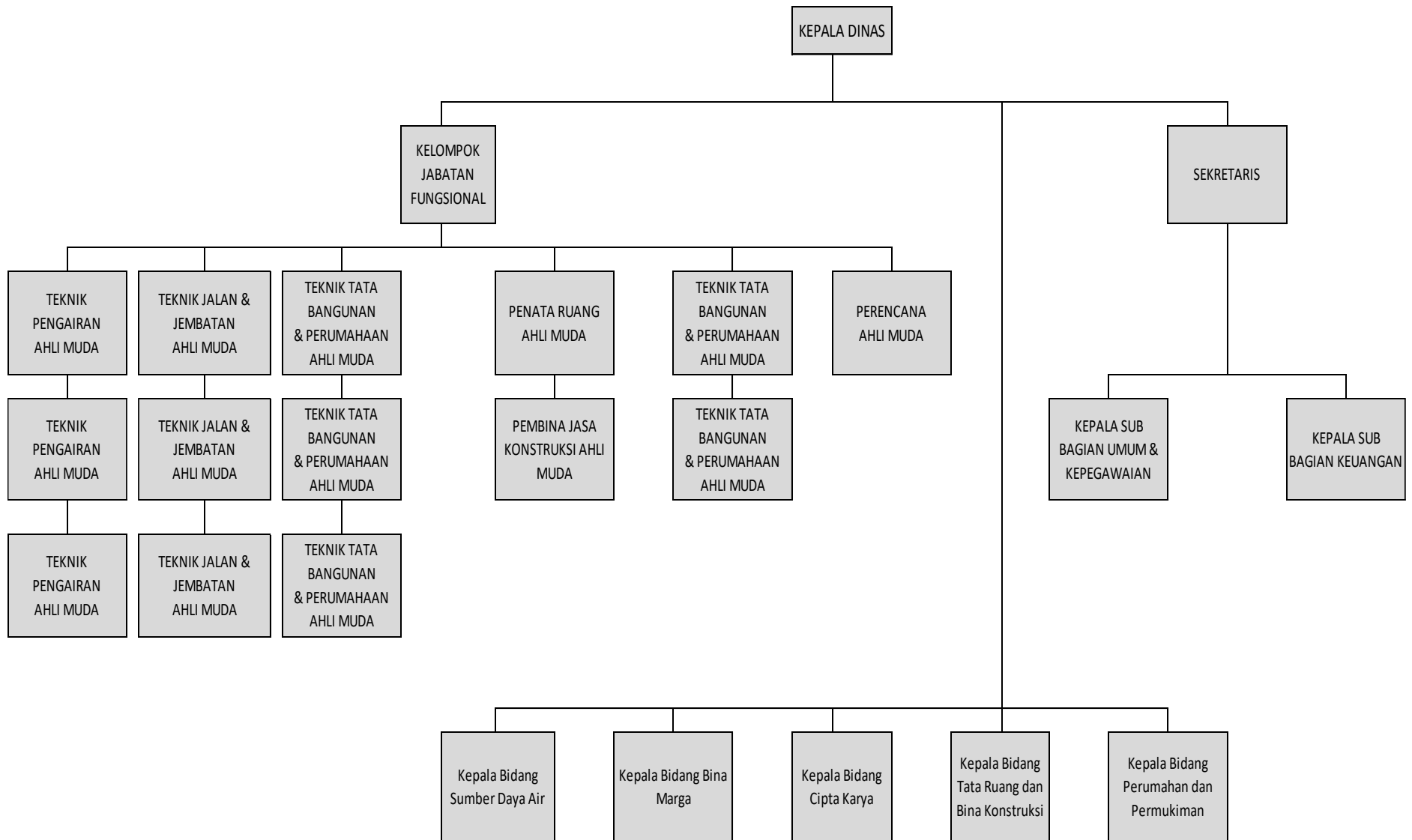
1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang-bidang
 - a. Kepala Bidang Pengairan, membawahkan :
 1. Teknik Pengairan Ahli Muda;
 2. Teknik Pengairan Ahli Muda;
 3. Teknik Pengairan Ahli Muda;
 - b. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 2. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 3. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 - d. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi membawahkan :
 1. Penata Ruang Ahli Muda;
 2. Penata Ruang Ahli Muda;
 3. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda.

e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formula pengukuran kinerja kegiatan dan formula pengukuran sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022, maka ditetapkan indikator - indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Input: Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya.
- 2) Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
- 3) Outcome : Indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung),

Pengukuran dengan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran pengukuran kinerja kegiatan (PKK) tahun 2023, sedangkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran pengukuran pencapaian sasaran (PPS) tahun 2022.

Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana/kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana} \times 100 \%}$$

Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal :

85 s.d > 100% = sangat baik

70 s.d < 85% = baik

55 s.d < 70% = sedang

< 55% = tidak berhasil

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur tahun 2022 berdasarkan implementasi pengelolaan kinerja Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman semakin disempurnakan dengan penetapan IKU dan Sasaran Strategis. Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran, Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPRPERKIM dalam mewujudkan : Kemantapan Jalan, Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan Keterpaduan pembangunan antar daerah antar sektor dan tingkat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.			
Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
1. Jumlah Dokumen Renja SKPD, LAKIP, LPPD, DPA-P, RKA	9 Jenis Dokumen	9 Jenis Dokumen	100 %
2. Jumlah Dokumen Analisa Perangkat Daerah, Laporan Rekonsiliasi Barang/Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	100 %

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100%
Persentase Laporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%
Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	95 Jenis ATK	95 Jenis ATK	100%
Persentase Bahan Logistik Kantor yang digunakan	100%	100%	100%
Persentase Barang Cetakan dan Pengandaan yang Tersedia	100%	100%	100%
Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	100%	100%	100%
Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara vertikal dan horizontal	100%	100%	100%
Persentase Surat Keluar	100%	100%	100%
Persentase Biaya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	100%	100%	100%
Persentase Belanja Jasa Honorarium Pegawai	100%	100%	100%
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	100%	100%
Persentase Pembayaran Pajak dan STNK Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	100%	100%	100%
Persentase Biaya Service Alat Berat	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	40 %	26,04 %	65,10 %
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80 %	36,20 %	45,25 %
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,60 %	89,38 %	93,49 %
Persentase dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	70 %	80 %	100%
Persentase rumah dengan akses Unit pengolahan dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	80 %	86,05 %	100%
Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	60 %	65 %	100%

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Tahun Eksisting	40 %	100%	100%
Persentase kawasan yang strategis dan terpadu	85 %	85,1 %	100%
Persentase Panjang Jalan yang ditingkatkan (Struktur/Fungsi)	65 %	23,88 %	25,14 %
Persentase Tersedianya jalan yang menjamin Pengendara Jalan yang berkendara dengan selamat dan Nyaman	99,95 %	67,61 %	67,64 %
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	40 %	28 %	70 %
Ketaatan terhadap RDTRK	90 %	80 %	88,89 %
Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	80 %	80 %	100%
Persentase kesesuaian Ruang dengan RTRW dan RDTR	70 %	20 %	70 %
Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	40 %	0 %	0 %
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	62,22 %	0 %	0 %

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	20 %	13,68 %	100%
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	80 %	80 %	100%
Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20 %	20 %	100%

Untuk menganalisis capaian kinerja dengan bertitik tolak atas pertanggung jawaban terhadap publik dengan menganalisis capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur terhadap sasaran strategis yang telah diformulasikan selama tahun anggaran 2022, baik terhadap kemampuan melaksanakan program, kegiatan serta pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dipadukan dengan pengukuran capaian kinerja menyangkut kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

Capaian Kinerja juga tidak terlepas dari pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia baik yang memiliki pendidikan keteknikan, Keuangan maupun administrasi perkantoran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan intrastruktur serta kemampuan meningkatkan sektor ekonomi perdesaan maupun perkotaan yang merupakan efek beruntun atas tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur.

1.3 Capaian Kinerja Untuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Capaian Kinerja Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai Berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD 2. Terlaksananya Penyusunan LAKIP, LPPD, DPA-P, RKA-P	2 Dokumen, 6 Jenis Dokumen	2 Kegiatan	99,98

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 2. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Yang Akurat 3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 4. Terselenggaranya koordinasi kedinasan secara vertikal dan horizontal	14 Bulan, 12 Bulan, 25 O/K, 69 O/K	3 Kegiatan	79,21

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terwujudnya Jaringan Listrik Yang Baik dan Aman 2. Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor 3. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Penunjang Kerja 4. Tersedianya Dokumen 5. Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam 1(satu) tahun	6 Jenis Barang, 95 Jenis ATK, 1 Paket Pengadaan, 426526 Lembar Penggandaan, 116 Eksemplar	5 Kegiatan	98,44

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terkirimnya surat Dinas selama 1 tahun 2. Tersedianya jasa komunikasi, kebutuhan air dan listrik 3. Terpenuhinya kesejahteraan pegawai	300 Surat, 3 Jenis Barang Jasa, 180 O/H	3 Kegiatan	86,34

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terwujudnya kendaraan operasional yang prima 2. Terwujudnya Kondisi Bangunan Yang Representatif	4 Jenis Kendaraan, 2 Paket PL	2 Kegiatan	65,02

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terpeliharanya Bangunan Penampungan Air Baku Masyarakat 2. Terencananya Pengembangan Pengendalian Banjir 3. Terjaga dan Telearikannya Daerah Aliran Sungai di Barito Timur	45%, 80%, 70%	3 Kegiatan	85,10

- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Pembuatan Saluran Primer 2. Terbangunnya Infrastruktur Penunjang Irigasi Bangunan Bagi Sadap 3. Terbangunnya dan Terpeliharanya Jaringan Pengairan Irigasi, Rawa Maupun Infrastruktur Lainnya	549 M', 5 Unit, 80%	3 Kegiatan	99,34

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/dtk	90,60 %	2 Kegiatan	98,02

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan berskala komunitas/kawasan/kota	82%	2 Kegiatan	99,98

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Tersedianya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	1 Paket,	2 Kegiatan	96,75
2. Terlaksananya Peningkatan Kawasan Kebersihan Perkotaan	10 Paket		

6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Panjang jalan dan drainase yang dibangun di lingkungan permukiman, penerangan jalan, taman dan hutan kota, ketenagalistrikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum	1 Paket Swakelola, 50 Paket	1 Kegiatan	96,87

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terencananya pengembangan infrastruktur untuk kawasan strategis dan cepat tumbuh	70%	2 Kegiatan	96,99

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman	85%,	5 Kegiatan	74,73
2. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	79%		
3. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dalam kondisi baik	75%, 75%		
4. Tersedianya jembatan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dalam kondisi baik	75%,		
5. Tersedianya jembatan yang menghubungkan antar daerah dalam wilayah Kabupaten Barito Timur			

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten Barito Timur	80%	1 Kegiatan	85,17

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya Perda RDTRK Perkotaan Tamiang Layang dan Perencanaan RDTRK Perkotaan Ampah dan Rencana Raperda RDTRK	75%	1 Kegiatan	80,40

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terbentuknya Tim Koordinasi Pemanfaatan Daerah (TKPRD) Kabupaten Untuk Pengawasan	75%	1 Kegiatan	99,81

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya Anggaran Sistem Informasi Penataan Ruang	75%	1 Kegiatan	0

11. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya Anggaran Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3 R/TPS	4 Paket	1 Kegiatan	78,33

12. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya penerbitan IMB, SLF, TABF, dan SIMBG	4 Perizinan	1 Kegiatan	100

13. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Data Perumahan di Kabupaten Barito Timur 2. Data Pertanahan dan Perumahan 10 Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	10 Dokumen	2 Kegiatan	79,24

14. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya penyusunan database perumahan/permukiman kumuh dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh	3 Paket	1 Kegiatan	95,15

15. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya anggaran prasarana dan sarana umum perumahan	1 Paket	1 Kegiatan	90,80

16. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperbaiki	1 Paket	1 Kegiatan	94,35

17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya pengembangan perumahan yang teregistrasi	1 Paket	1 Kegiatan	78,21

3.1 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja untuk pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Per 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	ANGGARAN			REALISASI				FISIK	Sisa Anggaran
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	%		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (5+8)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.024.572.157,00	675.436.040,00	10.700.008.197,00	8.002.922.842,00	674.125.580,00	8.677.048.422,00	81,09	81,09	2.022.959.775,00
1.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.646.900,00	-	92.646.900,00	92.632.850,00	-	92.632.850,00	99,98	99,98	14.050,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.129.500,00	-	58.129.500,00	58.128.650,00	-	58.128.650,00	100,00	100,00	850,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.517.400,00	-	34.517.400,00	34.504.200,00	-	34.504.200,00	99,96	99,96	13.200,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.974.253.422,00	-	6.974.253.422,00	5.524.080.671,00	-	5.524.080.671,00	79,21	79,21	1.450.172.751,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.496.635.422,00	-	6.496.635.422,00	5.050.433.571,00	-	5.050.433.571,00	77,74	77,74	1.446.201.851,00
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	451.200.000,00	-	451.200.000,00	451.200.000,00	-	451.200.000,00	100,00	100,00	-
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.418.000,00	-	26.418.000,00	22.447.100,00	-	22.447.100,00	84,97	84,97	3.970.900,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	660.817.015,00	225.436.040,00	886.253.055,00	647.184.683,00	225.230.580,00	872.415.263,00	98,44	98,44	13.837.792,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	-	50.000.000,00	49.910.000,00	-	49.910.000,00	99,82	99,82	90.000,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.455.415,00	199.907.760,00	299.363.175,00	99.102.278,00	199.702.300,00	298.804.578,00	99,81	99,81	558.597,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.937.000,00	25.528.280,00	50.465.280,00	24.937.000,00	25.528.280,00	50.465.280,00	100,00	100,00	-
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.353.200,00	-	107.353.200,00	107.213.966,00	-	107.213.966,00	99,87	99,87	139.234,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	19.825.000,00	-	19.825.000,00	66,08	66,08	10.175.000,00
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.200.000,00	-	16.200.000,00	15.450.000,00	-	15.450.000,00	95,37	95,37	750.000,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.871.400,00	-	332.871.400,00	330.746.439,00	-	330.746.439,00	99,36	99,36	2.124.961,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.885.100.000,00	-	1.885.100.000,00	1.627.566.636,00	-	1.627.566.636,00	86,34	86,34	257.533.364,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	100,00	100,00	-
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.700.000,00	-	238.700.000,00	77.466.636,00	-	77.466.636,00	32,45	32,45	161.233.364,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.634.400.000,00	-	1.634.400.000,00	1.538.100.000,00	-	1.538.100.000,00	94,11	94,11	96.300.000,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.754.820,00	450.000.000,00	861.754.820,00	111.458.002,00	448.895.000,00	560.353.002,00	65,02	65,02	301.401.818,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.754.820,00	-	383.754.820,00	83.458.002,00	-	83.458.002,00	21,75	21,75	300.296.818,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000,00	450.000.000,00	478.000.000,00	28.000.000,00	448.895.000,00	476.895.000,00	99,77	99,77	1.105.000,00
1.03.02	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.049.694.660,00	2.538.686.421,00	5.588.381.081,00	2.711.995.852,00	2.231.793.026,00	4.943.788.878,00	88,47	88,47	644.592.203,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.727.580.160,00	2.538.686.421,00	4.266.266.581,00	1.398.603.692,00	2.231.793.026,00	3.630.396.718,00	85,10	85,10	635.869.863,00
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	218.023.500,00	218.023.500,00	-	217.523.500,00	217.523.500,00	99,77	99,77	500.000,00
1.03.02.2.01.36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	57.332.000,00	2.320.662.921,00	2.377.994.921,00	57.001.300,00	2.014.269.526,00	2.071.270.826,00	87,10	87,10	306.724.095,00
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.670.248.160,00	-	1.670.248.160,00	1.341.602.392,00	-	1.341.602.392,00	80,32	80,32	328.645.768,00

Kode Rekening	Uraian	ANGGARAN			REALISASI				FISIK	Sisa Anggaran
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	%		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (5+8)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.322.114.500,00	-	1.322.114.500,00	1.313.392.160,00	-	1.313.392.160,00	99,34	99,34	8.722.340,00
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	769.724.000,00	-	769.724.000,00	769.550.200,00	-	769.550.200,00	99,98	99,98	173.800,00
1.03.02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	552.390.500,00	-	552.390.500,00	543.841.960,00	-	543.841.960,00	98,45	98,45	8.548.540,00
1.03.03	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.439.073.726,00	-	8.439.073.726,00	8.271.766.486,00	-	8.271.766.486,00	98,02	98,02	167.307.240,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.439.073.726,00	-	8.439.073.726,00	8.271.766.486,00	-	8.271.766.486,00	98,02	98,02	167.307.240,00
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler)	7.084.434.576,00	-	7.084.434.576,00	6.926.446.113,00	-	6.926.446.113,00	97,77	97,77	157.988.463,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler)	1.354.639.150,00	-	1.354.639.150,00	1.345.320.373,00	-	1.345.320.373,00	99,31	99,31	9.318.777,00
1.03.04	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	29.410.000,00	169.939.590,00	199.349.590,00	6.415.800,00	149.741.600,00	156.157.400,00	78,33	78,33	43.192.190,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	29.410.000,00	169.939.590,00	199.349.590,00	6.415.800,00	149.741.600,00	156.157.400,00	78,33	78,33	43.192.190,00
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	29.410.000,00	169.939.590,00	199.349.590,00	6.415.800,00	149.741.600,00	156.157.400,00	78,33	78,33	43.192.190,00
1.03.05	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.916.830.148,00	-	5.916.830.148,00	5.915.647.976,00	-	5.915.647.976,00	99,98	99,98	1.182.172,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.916.830.148,00	-	5.916.830.148,00	5.915.647.976,00	-	5.915.647.976,00	99,98	99,98	1.182.172,00
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler)	2.105.028.957,00	-	2.105.028.957,00	2.103.853.176,00	-	2.103.853.176,00	99,94	99,94	1.175.781,00
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.811.801.191,00	-	3.811.801.191,00	3.811.794.800,00	-	3.811.794.800,00	100,00	100,00	6.391,00
1.03.06	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	96.756.200,00	1.661.024.819,00	1.757.781.019,00	42.652.000,00	1.658.080.229,00	1.700.732.229,00	96,75	96,75	57.048.790,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	96.756.200,00	1.661.024.819,00	1.757.781.019,00	42.652.000,00	1.658.080.229,00	1.700.732.229,00	96,75	96,75	57.048.790,00
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	76.187.800,00	1.430.773.590,00	1.506.961.390,00	40.996.000,00	1.427.829.000,00	1.468.825.000,00	97,47	97,47	38.136.390,00
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	20.568.400,00	230.251.229,00	250.819.629,00	1.656.000,00	230.251.229,00	231.907.229,00	92,46	92,46	18.912.400,00
1.03.07	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	115.020.000,00	8.327.021.622,00	8.442.041.622,00	111.752.428,00	8.066.046.517,00	8.177.798.945,00	96,87	96,87	264.242.677,00
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	115.020.000,00	8.327.021.622,00	8.442.041.622,00	111.752.428,00	8.066.046.517,00	8.177.798.945,00	96,87	96,87	264.242.677,00
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	115.020.000,00	8.327.021.622,00	8.442.041.622,00	111.752.428,00	8.066.046.517,00	8.177.798.945,00	96,87	96,87	264.242.677,00
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	177.137.000,00	-	177.137.000,00	177.137.000,00	-	177.137.000,00	100,00	100,00	-
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Bangunan Gedung	177.137.000,00	-	177.137.000,00	177.137.000,00	-	177.137.000,00	100,00	100,00	-
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	177.137.000,00	-	177.137.000,00	177.137.000,00	-	177.137.000,00	100,00	100,00	-
1.03.09	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	8.571.641.578,00	12.424.908.549,00	20.996.550.127,00	8.065.568.433,00	12.298.743.407,00	20.364.311.840,00	96,99	96,99	632.238.287,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	8.571.641.578,00	12.424.908.549,00	20.996.550.127,00	8.065.568.433,00	12.298.743.407,00	20.364.311.840,00	96,99	96,99	632.238.287,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	102.150.900,00	-	102.150.900,00	101.621.250,00	-	101.621.250,00	99,48	99,48	529.650,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	8.469.490.678,00	12.424.908.549,00	20.894.399.227,00	7.963.947.183,00	12.298.743.407,00	20.262.690.590,00	96,98	96,98	631.708.637,00

Kode Rekening	Uraian	ANGGARAN			REALISASI				FISIK	Sisa Anggaran
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	%		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (5+8)
1.03.10	PENYELENGGARAAN JALAN	16.719.032.482,00	62.286.873.259,00	79.005.905.741,00	16.273.695.719,00	42.767.734.450,00	59.041.430.169,00	74,73	74,73	19.964.475.572,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	16.719.032.482,00	62.286.873.259,00	79.005.905.741,00	16.273.695.719,00	42.767.734.450,00	59.041.430.169,00	74,73	74,73	19.964.475.572,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	759.700.207,00	-	759.700.207,00	755.527.735,00	-	755.527.735,00	99,45	99,45	4.172.472,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	4.885.047.221,00	60.980.444.459,00	65.865.491.680,00	4.487.206.724,00	41.897.966.350,00	46.385.173.074,00	70,42	70,42	19.480.318.606,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.040.175.840,00	-	10.040.175.840,00	10.039.904.840,00	-	10.039.904.840,00	100,00	100,00	271.000,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	174.766.694,00	1.306.428.800,00	1.481.195.494,00	132.190.900,00	869.768.100,00	1.001.959.000,00	67,65	67,65	479.236.494,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	859.342.520,00	-	859.342.520,00	858.865.520,00	-	858.865.520,00	99,94	99,94	477.000,00
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	215.292.300,00	-	215.292.300,00	183.359.782,00	-	183.359.782,00	85,17	85,17	31.932.518,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	215.292.300,00	-	215.292.300,00	183.359.782,00	-	183.359.782,00	85,17	85,17	31.932.518,00
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	215.292.300,00	-	215.292.300,00	183.359.782,00	-	183.359.782,00	85,17	85,17	31.932.518,00
1.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	501.446.300,00	351.750.000,00	853.196.300,00	322.756.279,00	349.000.000,00	671.756.279,00	78,73	78,73	181.440.021,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	396.774.600,00	351.750.000,00	748.524.600,00	252.781.965,00	349.000.000,00	601.781.965,00	80,40	80,40	146.742.635,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	253.203.800,00	351.750.000,00	604.953.800,00	252.781.965,00	349.000.000,00	601.781.965,00	99,48	99,48	3.171.835,00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	143.570.800,00	-	143.570.800,00	-	-	-	-	-	143.570.800,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.110.300,00	-	70.110.300,00	69.974.314,00	-	69.974.314,00	99,81	99,81	135.986,00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	70.110.300,00	-	70.110.300,00	69.974.314,00	-	69.974.314,00	99,81	99,81	135.986,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	34.561.400,00	-	34.561.400,00	-	-	-	-	-	34.561.400,00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	34.561.400,00	-	34.561.400,00	-	-	-	-	-	34.561.400,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	74.985.800,00	-	74.985.800,00	59.417.726,00	-	59.417.726,00	79,24	79,24	15.568.074,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	74.985.800,00	-	74.985.800,00	59.417.726,00	-	59.417.726,00	79,24	79,24	15.568.074,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	43.423.200,00	-	43.423.200,00	36.055.000,00	-	36.055.000,00	83,03	83,03	7.368.200,00
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	31.562.600,00	-	31.562.600,00	23.362.726,00	-	23.362.726,00	74,02	74,02	8.199.874,00
1.04.03	KAWASAN PERMUKIMAN	177.647.300,00	-	177.647.300,00	169.029.600,00	-	169.029.600,00	95,15	95,15	8.617.700,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	177.647.300,00	-	177.647.300,00	169.029.600,00	-	169.029.600,00	95,15	95,15	8.617.700,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	177.647.300,00	-	177.647.300,00	169.029.600,00	-	169.029.600,00	95,15	95,15	8.617.700,00
1.04.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	313.337.400,00	-	313.337.400,00	295.622.271,00	-	295.622.271,00	94,35	94,35	17.715.129,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	313.337.400,00	-	313.337.400,00	295.622.271,00	-	295.622.271,00	94,35	94,35	17.715.129,00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	313.337.400,00	-	313.337.400,00	295.622.271,00	-	295.622.271,00	94,35	94,35	17.715.129,00
1.04.05	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.462.554.380,00	1.792.485.259,00	3.255.039.639,00	1.397.661.112,00	1.557.853.600,00	2.955.514.712,00	90,80	90,80	299.524.927,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.462.554.380,00	1.792.485.259,00	3.255.039.639,00	1.397.661.112,00	1.557.853.600,00	2.955.514.712,00	90,80	90,80	299.524.927,00

Kode Rekening	Uraian	ANGGARAN			REALISASI				FISIK	Sisa Anggaran
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	%		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (5+8)
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.462.554.380,00	1.792.485.259,00	3.255.039.639,00	1.397.661.112,00	1.557.853.600,00	2.955.514.712,00	90,80	90,80	299.524.927,00
1.04.06	PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.248.200,00	-	50.248.200,00	39.298.200,00	-	39.298.200,00	78,21	78,21	10.950.000,00
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil	50.248.200,00	-	50.248.200,00	39.298.200,00	-	39.298.200,00	78,21	78,21	10.950.000,00
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50.248.200,00	-	50.248.200,00	39.298.200,00	-	39.298.200,00	78,21	78,21	10.950.000,00
	JUMLAH TOTAL	55.934.679.631,00	90.228.125.559,00	146.162.805.190,00	52.046.699.506,00	69.753.118.409,00	121.799.817.915,00	83,33	83,33	24.362.987.275,00

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR



YUMAIL J PALADUK, ST., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690514 199803 1 010

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang dapat dikategorikan baik/berhasil terlihat jelas bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur sudah secara tepat melaksanakan kebijaksanaan dan program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran terdapat kendala-kendala yang menjadi masalah atau hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah :

1. Masih terdapat ruas-ruas jalan yang belum tertangani
2. Masih banyak terdapat konstruksi jembatan kayu yang kesulitan untuk mendapatkan akses bahan (kayu ulin) untuk pemeliharaan konstruksi jembatan kayu.
3. Belum tercapainya target universal akses air bersih di kawasan perkotaan dan di pedesaan.
4. Masih terdapatnya rumah tangga dengan sanitasi tidak layak
5. Masih banyak infrastruktur pengairan yang belum dibangun dan ditingkatkan seperti jaringan primer dan sekunder.
6. Belum adanya data kajian teknis pengairan terkait daerah irigasi sungai dan danau
7. Belum selesainya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Tamiang layang.

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Membangun dan meningkat akses jalan menuju semua Kabupaten/Kota baik di

Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten/Kota baik menuju Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Mengganti jembatan konstruksi kayu yang kondisinya sudah tidak layak dengan jembatan konstruksi beton.
3. Perlunya kerjasama antar instansi yang berhubungan dengan peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan ditingkat perkotaan maupun perdesaan di Kabupaten Barito Timur.
4. Pemerintah Kabupaten Barito Timur sedang menyiapkan rumusan kebijakan yang jelas tentang peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.
5. Membangun dan meningkatkan jaringan primer, sekunder, dan tersier serta bangunan teknis lainnya yang masuk sebagai kewenangan Kabupaten.
6. Untuk mendukung kegiatan peningkatan jaringan irigasi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah menyiapkan data dukung berupa:
 - a) Peta situasi;
 - b) Luas daerah irigasi;
 - c) Data dan skema jaringan irigasi.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedang menyiapkan kelengkapan data pendukung untuk penyusunan Perda tentang RDTR Kota Tamiang Layang, yang pada tahun 2020 sudah dijadwalkan untuk masuk Program Legislatif (Proleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Demikian LKIP ini disusun sebagai bahan evaluasi dan masukan serta saran bagi siapa saja yang mempunyai kepedulian guna membantu meningkatkan kinerja yang semakin akuntabel, transparan, efektif serta efisien.

Tamiang Layang, Pebruari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur



YUMAIL J PALADUK, ST., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 1969-514 199803 1 010